



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3243>

### PIKIRAN TALCOT PARSONS TERHADAP FENOMENA PASCA BENCANA ALAM

Aloysius Jondar<sup>1</sup>, Agus Purbo Widodo<sup>2</sup>, Lukman Hakim<sup>3</sup>, Susanto<sup>4</sup>, Yoram Oddang Laleat<sup>5</sup>,  
Muhammad Sujudi<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

*Article history:*

Received date: 7 Juli 2022

Revised date: 28 Juli 2022

Accepted date: 30 Juli 2022

#### ABSTRACT

*The article that discusses Talcot Parsons' thoughts and their implementation in post-earthquake natural disasters, has its own uniqueness and becomes a serious problem. Starting from that, the problems that need to be answered in this study are 1). What changes will occur after the disaster? 2). Is Talcot Parsons' way of thinking still relevant in seeing changes in society in post-disaster social life? The findings obtained conclude that the phenomenon of natural disasters in Indonesia brings changes in social, cultural behavior, economy, infrastructure for disaster victims. The concept of social system change developed by Talcot Parsons is still relevant to be developed in Indonesia because disaster victims can make social changes through adaptation mechanisms, achieve goals, can integrate, can maintain elements of togetherness in building disaster victims and have a high civilization. In managing disaster victims, the government is responsible for building new communities through the construction of new houses for disaster victims as well as through repairing damaged houses and building infrastructure to launch the economy of the victims. The government also always improves maximum service to disaster victims by increasing disaster anticipation training and comparative studies for disaster victims who have succeeded in building new villages for disaster victims.*

*Keywords : Disasters and Safety, Goal, Adaptasi, Integrasi, Laten.*

## ABSTRAKSI

---

Artikel yang membahas pikiran Talcot Parsons dan implementasinya terhadap bencana alam pascagempa, memiliki keunikan tersendiri dan menjadi permasalahan yang serius. Bertolak dari hal itu, maka masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah 1). Perubahan apa yang akan terjadi setelah bencana? 2). Apakah cara berpikir Talcot Parsons masih relevan dalam melihat perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial pascabencana terjadi? Temuan yang diperoleh menyimpulkan fenomena bencana alam di Indonesia membawa perubahan sosial, perilaku budaya, ekonomi, infrastruktur bagi masyarakat korban bencana. Konsep perubahan sistem sosial yang dikembangkan Talcot Parsons masih relevan untuk dikembangkan di Indonesia karena korban bencana dapat melakukan perubahan sosial melalui mekanisme adaptasi, pencapaian tujuan, dapat melakukan integrasi, dapat memelihara unsur kebersamaan dalam membangun masyarakat korban bencana dan memiliki peradaban yang tinggi. Dalam mengelola warga masyarakat korban bencana, pemerintah ikut bertanggung jawab dalam membangun komunitas baru melalui pembangunan rumah baru bagi warga korban bencana maupun melalui perbaikan rumah warga yang rusak serta membangun infrastruktur untuk melancarkan roda perekonomian warga korban. Pemerintah juga selalu meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada warga korban bencana melalui peningkatan pelatihan antisipasi bencana dan studi banding kepada warga korban bencana yang sudah sukses membangun perkampungan baru bagi korban bencana.

Kata kunci : *Disasters and Safety, Goal, Adaptasi, Integrasi, Laten.*

## PENDAHULUAN

Apa penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia? Apakah karena bencana alam atau buatan manusia? Bencana dapat disebabkan oleh karena faktor bencana alam (*natural disaster*) maupun manusia (*man-made disaster*). Studi yang dilakukan United International Locations Worldwide Method for Disaster Reduction (UN-ISDR), bencana geologi (*geological disaster*) dan bencana hidrometeorologis (*hydrometeorological disaster*). diklasifikasikan ke dalam (Studi) bahaya. Lempeng Samudera Hindia, dan Pasifik dari Sumatera ke Indonesia Timur? Apakah ada busur vulkanik yang memanjang ke landmark Javanusa? Sulawesi, dengan pegunungan vulkanik purba dan dataran rendah di sisinya, sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut berpotensi dan rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara yang paling tahan gempa di dunia, lebih dari 10 kali lipat yang terjadi di Amerika Serikat. Gempa bumi akibat interaksi 4.444 lempeng tektonik dapat menimbulkan tsunami bila terjadi di laut. Indonesia sering mengalami tsunami di daerah yang sangat terpengaruh oleh pergerakan lempeng tektonik tersebut. Tsunami Indonesia terutama disebabkan oleh gempa struktural di sepanjang zona subduksi dan daerah seismik lainnya. Antara tahun 1600 dan 2000, terjadi 155 tsunami, 90% di antaranya disebabkan oleh gerakan kerak bumi, 9% di antaranya disebabkan oleh letusan gunung berapi dan 1% di antaranya karena tanah longsor. Wilayah pesisir Indonesia, khususnya pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa, pesisir utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, pesisir utara Irian Jaya, dan hampir seluruh pesisir Indonesia rentan terhadap tsunami. Di Sulawesi, dan Laut Maluku adalah daerah yang paling terkena dampak tsunami. Antara tahun 1600 dan 2000, terjadi 32 tsunami di wilayah tersebut, 28 di antaranya disebabkan oleh gempa bumi dan 4 di antaranya disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar laut.

Di samping itu, daratan Indonesia beriklim tropis, dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan, yang ditandai dengan cuaca, suhu, dan arah angin yang berubah-ubah. Kondisi iklim ini, dikombinasikan dengan topografi permukaan yang relatif berbeda dan kondisi fisik dan kimia batuan, menghasilkan kondisi tanah yang subur.

Di sisi lain, kondisi ini dapat berdampak negatif bagi manusia, antara lain bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan cenderung semakin parah, serta frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan) semakin meningkat di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja, longsor dan banjir bandang terjadi di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggeng dan beberapa daerah lainnya. Pembangunan di Indonesia dirancang dan dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kemungkinan segmen kesalahan aktif

Segmen patahan aktif yang dapat menyebabkan gempa dengan magnitudo lebih besar dari 6,5 diidentifikasi mencapai 295 patahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak tempat di mana sesar aktif dapat dilintasi dan terancam oleh dampak seismik dan deformasi gerakan sesar. Frekuensi gempa dengan magnitudo kurang dari 5 juga relatif tinggi. Meski magnitudonya kecil, jika gempa terjadi di jalur sesar dangkal yang ramai, gempa tersebut dapat merusak infrastruktur dan mengganggu masyarakat.

Berdasarkan catatan BMKG, dampak rata-rata gempa satu tahun yakni 1). Gempa bumi dengan berbagai magnitudo dari sekitar 5.000-6.000 kali; 2). Gempa bumi serius dengan magnitudo  $M > 5,0$  sebanyak 250-350 kali; 3). Bencana gempa bumi terjadi sekitar 8-10 kali; 4). Dalam dua tahun, gempa bumi dapat menyebabkan tsunami tunggal.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016, terdapat delapan (8) provinsi paling rawan bencana. Jawa Tengah

merupakan daerah paling rawan bencana di Indonesia. BNPB mencatat, selama Januari-September 2016 telah terjadi 397 bencana di provinsi tersebut. Wilayah di Pulau Jawa yang lain yang juga mengalami bencana terbanyak adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Banjir menjadi bencana yang paling banyak menimpa daerah-daerah di Indonesia (Arif Lukman, 2020).

Dilihat dari jumlah kabupaten, terdapat 153 kabupaten/kota berada di zona bahaya gempa tinggi antara tahun 2013 dan 2018. Saat ini, 203 juta orang tinggal di daerah rawan gempa, di mana 60,9 juta di antaranya tinggal di daerah rawan gempa

Gempa bumi, banjir atau tsunami adalah bencana alam. Bahaya alam menjadi bencana alam ketika orang, infrastruktur atau bentuk nyata atau tidak berwujud lainnya dari modal terancam dan/atau dihancurkan oleh bahaya. Bencana alam ini dapat terjadi apabila kerentanan alam dan kerentanan manusia memiliki koordinat yang sama dalam ruang dan waktu. Bencana alam ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga aset fisik dan lingkungan, dibangun sebelum, selama dan setelah bencana alam karena kurangnya kesadaran dari pemangku kepentingan. Menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, menjadi tugas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tindakan sebelum bencana, dengan harapan dapat mengurangi akibat bencana dapat mengurangi dampak itu sendiri. Untuk mengurangi dampak bencana dikenal dengan istilah mitigasi bencana. Dalam PP No. 21 Tahun 2008, Pasal 1(6) menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana adalah upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas bagi penanggulangan ancaman bencana (Arif Lukman, 2020)

Setidaknya perlu ada penjelasan yang rasional dalam memahami kesenjangan masalah bencana alam ini. *Pertama*, dalam lingkungan penelitian interdisipliner global, sulit dan kompleks untuk mengidentifikasi siapa yang merupakan peneliti bahaya atau bencana. Misalnya, bidang ini terdiri dari peneliti dari negara-negara di seluruh dunia yang berbicara bahasa yang berbeda. Para peneliti ini dididik dalam berbagai disiplin ilmu, teknik, dan

humaniora, dan berafiliasi dengan berbagai lembaga akademik, swasta, nirlaba, dan pemerintah (mengidentifikasi peneliti dalam berbagai disiplin ilmu). *Kedua*, bidang ini telah berkembang secara dramatis di abad ke-21. Kelompok Kerja Bahaya dan Bencana Berorientasi Ilmu Sosial memiliki akar disiplin dalam sosiologi dan geografi, tetapi saat ini memiliki 4.444 anggota dari semua ilmu sosial di bidang ini.

Perluasan wilayah yang cepat juga sebagian disebabkan oleh meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan bencana di seluruh dunia. 20 tahun terakhir telah menghancurkan, termasuk serangan teroris 9/11, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, Badai Katrina 2005, gempa Haiti 2010, Badai Maria 2017, dan wabah COVID-19.

Dari Januari 2021 hingga akhir Agustus, terjadi bencana alam 1805. Tahun berikutnya tidak dicatat. Selama periode ini, bencana hidrometeorologi lembab mendominasi.

Kita juga mendorong para peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk berpartisipasi dalam disiplin ini. Banyak dari peneliti baru ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan. Namun, sifat penelitian bencana yang sangat didorong oleh peristiwa dan fakta bahwa keterlibatan peneliti dapat bersifat sporadis dan terputus-putus semakin memperumit pelaksanaan sensus yang akurat (Lori Peek, Heather, Jessica Austin, Mason Mathews, dan Haorui Wu, 2020).

Bagi peneliti yang mempelajari situasi sosial setelah gempa, berbagai masalah yang muncul setelah gempa bisa menjadi serius. Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan yang perlu dijawab dalam kajian artikel ini adalah 1). Perubahan apa yang akan terjadi setelah bencana? 2). Apakah pemikiran Talcott Parsons masih terkait dengan melihat perubahan sosial dalam kehidupan sosial pascabencana?

### **Pengertian Bencana dan Perubahan Sosial**

Kata "bencana" berasal dari kata Latin *dis-astrum*, yang berarti "bintang yang tidak menyenangkan". Bencana dalam arti asalnya secara historis telah ditafsirkan dan digunakan sebagai bencana skala besar yang tiba-tiba karena lokasi planet dan bintang yang tidak

menguntungkan. Ini berarti "di luar kendali" karena disebabkan oleh kehendak Tuhan. Dengan kata lain, bencana terutama dianggap sebagai bencana yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti angin topan dan gempa bumi. Konsep bencana bervariasi menurut negara dan organisasi. Di Korea Selatan, *Disaster Safety Act* mendefinisikan bencana sebagai "hal-hal yang dapat membahayakan atau menyebabkan nyawa, anggota badan, dan harta benda warga negara dan bangsa." Definisi pertama bencana dalam hukum Korea adalah Undang-Undang Penanggulangan Bencana Topan dan Banjir (UU No. 1894), yang mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1967, dan kata Korea "jehe" adalah kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Dalam undang-undang ini, kata bahasa Inggris "*disaster*" diartikan sebagai kata Korea "jehe", yang berarti bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Undang-undang ini diubah seluruhnya menjadi Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam (UU No. 4993) pada tanggal 6 Desember 1995. Di Indonesia, istilah "bencana" digunakan untuk mencakup bencana alam, teknologi, dan sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, yang mencerminkan karakteristik masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pengertian "bencana" adalah rusak berat oleh sebab-sebab alam, teknis dan sosial, dan sulit untuk memulihkan dari kerusakan itu dengan caranya sendiri, yang memerlukan kerjasama seluruh masyarakat untuk menanggulangnya. Perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat dan mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, hubungan, dan pola perilaku antar kelompok masyarakat (Ita Rustiati Ridwan, 2010)

Berbagai perspektif perubahan sosial adalah

- 1). Perubahan struktur sosial dan hubungan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan distribusi karena perubahan usia, kelahiran, dan hubungan pekerja-majikan.
- 2). Perubahan yang terjadi dan mempengaruhi sistem sosial masyarakat, seperti nilai, hubungan, dan pola perilaku antar kelompok masyarakat.
- 3). Perubahan yang terjadi dalam interaksi yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan gaya hidup yang diterima (Form William, 2022)

## Perubahan dalam Sistem sosial

Teori yang dipakai untuk memahami persolan pacabencana adalah teori perubahan sistem sosial yang dikembangkan Talcot Parson. Menurut Parsons, jika semua individu dalam masyarakat memiliki budaya yang sama, mereka membentuk suatu sistem sosial. Selain kesamaan budaya, diperlukan suatu sistem sosial bahwa tindakan sosial dari berbagai anggota masyarakat harus terkoordinasi dengan baik dan tidak boleh bertentangan sehingga merusak harmoni sosial. Dalam masyarakat maju, lembaga-lembaga tertentu melakukan pekerjaan sistematisasi tindakan sosial ini.

Teori Parsons tentang sistem sosial dihadapkan pada empat masalah fungsional yang disingkat dengan sebutan AGIL (adaptasi, goal, integration, latent). Masalah-masalah tersebut adalah masalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Parsons menjelaskan 4 fungsi mendasar yang harus dilakukan oleh setiap sistem sosial yaitu

- 1). Adaptasi. Fungsi adaptasi adalah menciptakan dan mengalokasikan sumber daya yang dapat ditangani dengan lancar. Konsekuensi pertama dari fungsi adaptif, yaitu pemeliharaan pola, mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai dasar sistem sosial dan untuk mengatasi ketegangan yang timbul dari komitmen untuk berserikat untuk nilai-nilai tersebut. Integrasi mengacu pada alokasi hak dan kewajiban, penghargaan dan fasilitas, memastikan hubungan yang harmonis antara anggota sistem sosial. Konsekuensi kedua dari fungsi adaptif adalah keragaman tujuan, terkait dengan perbedaan antara pencapaian tujuan dan fungsi adaptif. Ketika hanya ada satu tujuan, masalah penilaian kegunaan fasilitas dikurangi sejauh yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dengan keragaman tujuan, sarana langka akan memiliki penggunaan alternatif dalam sistem kata target, dan kegunaannya untuk suatu tujuan berarti mengorbankan manfaat apa pun yang mungkin dimilikinya. Pada dasarnya, perlu untuk membuat perbedaan analitis antara fungsi mencapai tujuan secara efektif dan fungsi menyediakan sarana sekali pakai, terlepas dari relevansinya dengan tujuan tertentu. Sama seperti berbagai ujung yang lebih rendah dan lebih spesifik, ada juga berbagai pangkalan yang relatif spesifik. Oleh karena itu, ada masalah paralel mengatur fasilitas tersebut dalam

satu sistem. Kriteria utama adalah untuk memberikan fleksibilitas, sejauh kompatibel dengan efisiensi, ke sistem. Dalam tipe sistem sosial yang kompleks, ketersediaan fasilitas ini mengkristal di sekitar pelebagaan uang dan pasar. Secara lebih umum, pada tingkat makro sistem sosial, fungsi tujuan adalah pusat organisasi politik masyarakat, sedangkan fungsi adaptif adalah pusat organisasi ekonomi. Jenis fasilitas yang paling penting melibatkan kontrol objek fisik, akses ke layanan agensi manusia, dan faktor budaya tertentu. Agar mekanisme kontrolnya sangat dapat digeneralisasikan, unit sumber daya tertentu harus "dapat dipulihkan", yaitu tidak terkait dengan penggunaan khusus hipotetis. Oleh karena itu, sistem pasar menjadi pusat perhatian organisasi adaptasi masyarakat. Sifat-sifat yang sebanding bekerja dalam masyarakat yang kurang berbeda dan dalam subsistem yang lebih berbeda di mana pasar berfungsi daripada menembus, seperti sebuah keluarga.

2) Fungsi pencapaian tujuan. Fungsi ini berkaitan dengan memaksimalkan kemampuan komunitas untuk mencapai tujuan kolektif. Pencapaian tujuan menyiratkan perlunya memobilisasi agen dan sumber daya secara terorganisir untuk memproduksi atau membeli peralatan atau sumber daya publik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi adaptif dan pencapaian tujuan melibatkan struktur, mekanisme, dan proses yang terlibat dalam hubungan ini.

3) Fungsi integrasi. Fungsi ini berperan menggabungkan elemen dinamis dan budaya atau simbolis ke dalam sistem yang teratur. Dalam hierarki kendali, terletak antara fungsi mempertahankan model dan pencapaian tujuan. Pengakuan kita tentang pentingnya integrasi menyiratkan bahwa semua sistem, dengan pengecualian kendala, dibedakan dan disegmentasi menjadi unit yang relatif independen, yaitu mereka harus diperlakukan sebagai sistem yang mempertahankan batas-batas dalam lingkungan sistem lain, dalam hal ini sistem lain, sistem, subsistem yang sama, sistem yang lebih menyeluruh. Masalah integrasi fungsional melibatkan penyesuaian timbal balik dari "unit" atau subsistem ini dalam hal "kontribusi" mereka terhadap operasi yang efisien dari keseluruhan sistem. Hal ini, pada gilirannya, berkaitan dengan hubungannya dengan masalah mempertahankan

pola, serta dengan keadaan eksternal melalui proses pencapaian tujuan dan adaptasi. bahwa konstitusi tertinggi mengatur pembagian hak dan kewajiban, fasilitas dan penghargaan, di antara berbagai unit sistem yang kompleks. Standar-standar ini memfasilitasi penyesuaian internal berdasarkan stabilitas sistem nilai atau perubahan yang sering terjadi, serta adaptasi terhadap persyaratan perubahan situasi eksternal.

Untuk sistem sosial seperti itu, fokus orientasi tujuannya terletak pada hubungannya sebagai suatu sistem dengan kepribadian individu-individu yang berpartisipasi. Ini menyangkut, bukan komitmen terhadap nilai-nilai masyarakat, tetapi motivasi untuk menyumbangkan apa yang diperlukan untuk berfungsinya sistem; "kontribusi" ini bervariasi sesuai dengan urgensi tertentu. Sebagai contoh, dengan mempertimbangkan masyarakat Amerika, seseorang dapat menyarankan bahwa, mengingat sistem nilai utama, pada periode Perang Dingin telah terjadi masalah besar dalam memotivasi sektor-sektor besar penduduk ke tingkat upaya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan posisi kepemimpinan dunia dalam situasi yang sangat tidak stabil dan berubah dengan cepat

4) Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan pola mengacu pada keharusan menjaga stabilitas pola-pola budaya yang dilembagakan yang mendefinisikan struktur sistem. Ada dua aspek yang berbeda dari imperatif fungsional ini. Yang pertama menyangkut karakter pola normatif itu sendiri; yang kedua menyangkut keadaan "institusionalisasi." Dari sudut pandang partisipan individu dalam suatu sistem sosial, ini dapat disebut *komitmen motivasionalnya* untuk bertindak sesuai dengan pola normatif tertentu. Hal ini, seperti yang akan kita lihat, melibatkan "internalisasi" mereka dalam struktur kepribadian.

Dengan demikian, fokus pemeliharaan pola terletak pada kategori struktural *nilai*, yang akan dibahas saat ini. Dalam hubungan ini, fungsi esensialnya adalah pemeliharaan, pada tingkat budaya, stabilitas nilai-nilai yang dilembagakan melalui proses-proses yang mengartikulasikan nilai-nilai dengan sistem kepercayaan, yaitu keyakinan agama, ideologi, dan sejenisnya. Nilai-nilai, tentu saja, dapat berubah, tetapi apakah kecenderungan empiris menuju stabilitas atau tidak, potensi gangguan dari sumber ini sangat besar, dan penting untuk mencari mekanisme yang

cenderung melindungi tatanan seperti itu — bahkan jika ketertiban dalam proses mengubah.

Aspek kedua dari fungsi kontrol ini menyangkut: motivasi melakukan individu di tempat lain disebut "manajemen ketegangan." Masalahnya adalah mekanisme sosialisasi individu, yaitu dari proses dimana nilai-nilai masyarakat diinternalisasikan ke dalam dirinya kepribadian. Tetapi bahkan ketika nilai telah diinternalisasi, komitmen yang terlibat adalah subjek untuk berbagai jenis regangan. Banyak wawasan baru-baru ini diperoleh tentang itu cara di mana mekanisme seperti ritual, berbagai jenis simbolisme ekspresif, itu seni, dan memang rekreasi, beroperasi dalam hubungan ini.

Pemeliharaan pola dalam pengertian ini berperan dalam teori sistem sosial, seperti halnya sistem tindakan lainnya, sebanding dengan konsep kelembaman dalam mekanika. Ini berfungsi sebagai titik referensi paling mendasar di mana analisis faktor lain yang lebih bervariasi dapat dikaitkan. Dipahami dan digunakan dengan benar, itu tidak menyiratkan dominasi empiris stabilitas atas perubahan. Namun, ketika kita mengatakan bahwa, karena rangkaian urgensi fungsional ini, sistem sosial menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan pola strukturalnya. Pada dasarnya terdapat dua hal. *Pertama*, memberikan titik referensi untuk analisis yang teratur dari berbagai macam masalah variasi yang dapat diperlakukan sebagai yang timbul dari sumber selain proses perubahan struktural dalam sistem, termasuk yang terakhir konsepnya pembubaran. *Kedua*, membuat dia jernih bahwa ketika kita menganalisis perubahan struktural, kita berhadapan dengan jenis masalah teoretis yang berbeda dari yang terlibat dalam ekuilibrasi. Oleh karena itu, ada hubungan langsung antara fungsi pemeliharaan pola — yang dibedakan dari tiga imperatif fungsional lainnya — dan perbedaan antara masalah analisis ekuilibrium, di satu sisi, dan analisis perubahan struktural di sisi lain. Perbedaan antara kedua jenis masalah ini menjadi fokus dalam paradigma (Calhoun Creig, et al, 2007)

Membahas perubahan sosial dalam sistem sosial dapat dilakukan secara bertahap: 1). Pada tingkat pertama, Parsons menganalisis perubahan sosial yang dihasilkan dari diferensiasi peran, proses sosialisasi dan pelebagaan, dan ketegangan terkait (ingat gambar sebelumnya). Perubahan ini lambat, terus menerus, dan secara

inheren dapat beradaptasi. Ada serangkaian proses yang terlibat. Bentuk-bentuk perubahan sosial adalah inovasi atau rasionalisasi, pelebagaan inovasi, perkembangan egoisme atas sistem adaptasi baru, dan terakhir tradisi inovasi. 2). Tingkat kedua adalah perubahan masyarakat melalui gerakan "revolusioner". Perubahan sosial jenis ini merupakan hasil dari gerakan "revolusioner" yang menyebabkan perubahan mendadak atau perubahan keseimbangan sistem sosial (Mohinuddin, 2022)

## METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan tujuan: 1). Untuk dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi pada pascabencana alam; 2). Untuk dapat mengetahui relevansinya teori Talcot Parson terhadap sistem sosial dan perubahan sosial yang terjadi pada pascabencana di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kajian pustaka berdasarkan metode *study systematic literature review*.

Cara yang dilakukan yaitu mengumpulkan data teori yang terkait dengan teori sistem sosial dan perubahan sosial yang dikembangkan Tacot Parsons dari buku dan jurnal ilmiah. Penulis mendeskripsikan teori yang terkait dan melakukan analisis berdasarkan data-data penelitian yang ditemukan dari jurnal ilmiah yang menjadi obyek kajian peneliti. Data hasil penelitian dari beberapa jurnal dianalisa berdasarkan teori fungsional yang dikemukakan Talcot Parson dengan realita yang terjadi di Indonesia.

Analisis yang dipakai menggunakan pendekatan deduksi ke induksi dalam melakukan analisis. Selain itu, menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam memahami dan memaknai peristiwa perubahan yang terjadi pada pasca bencana alam di Indonesia (Pablo Aznar-Crespo, Antonio Aledo, Joaquesayan Melgarejo-Moreno, dan Arturo Vallejos-Romero, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Pasca Bencana

Kajian sosiologi tentang perubahan sosial paling dinamis, karena perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan pada perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural (struktur masyarakat), dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Lebih jelas terdapat dalam tabel perubahan pasca bencana berikut ini

Tabel 1. Perubahan Pasca Bencana

N o	Perubahan sosial	Perilaku Budaya	Ekonomi	Infrastruktur
1	Korban Jiwa	Individu	Tidak berfungsi pasar tradisional	Hilangnya resapan air got
2	Hanyut, tenggelam	Adat dan rasa kekeluargaan hilang	Kehilangan lahan perkebunan tanaman produktif	Jalan raya diperbaiki
3	Luka-luka, korban hilang	Pergeseran nilai kepedulian	Kehilangan Mata Pencahari an	Rumah warga diperbaiki
4	Pengungsian, berjangkitnya wabah	Memudarnya budaya lokal		Pembangunan rumah baru di pemukiman baru
5	Aktivitas jaringan kekerabatan terganggu.	Kurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah		
6	Jauh dari tetangga dan tinggal di	Diskriminasi terhadap perempuan		

	Pemukiman Baru	an semakin buruk		
--	----------------	------------------	--	--

### 1. Kondisi perubahan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi setelah mengalami bencana alam di Indonesia menurut hasil penelitian ini adanya korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan aktivitas jaringan kekerabatan terganggu. Pasca banjir masyarakat dilarang untuk tinggal di daerah rawan bencana. Korban bencana berinisiatif sendiri mencari lokasi perumahan baru sehingga terjadi perubahan lingkungan fisik atau jarak sosial mengakibatkan lokasi perumahan mereka berjauhan. Hal ini dialami ketika bencana banjir di Wae Ela maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Selain berjauhan dengan tetangga dan sanak saudara karena membentuk pemukiman baru, secara sosial budaya ikut mempengaruhi tatanan kehidupan pada masyarakat Soa, baik Soa yang terkena banjir (Hena Helu, Soa Ulisiahu dan Soa Elatua) maupun Soa yang tidak terkena banjir (soa Nau dan Hena lale).

Pada sisi sosial budaya banjir Wae Ela juga memengaruhi tatanan adat khususnya pada masyarakat Soa yang mengalami perubahan. Namun menurutnya, pemerintah Negeri Hena Lima akan berusaha membenahinya sehingga tidak hilang Soa secara struktur pemerintahan adat. Kemudian dalam hal pendidikan, bahwa akibat bencana banjir prestasi siswa di Negeri Hena Lima mengalami penurunan karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai sehingga proses belajar mengajar berlangsung di dalam tenda pengungsian yang digunakan sebagai gedung sekolah.

Selain itu, perubahan-perubahan tersebut terjadi pada berbagai sektor vital kehidupan masyarakat yang meliputi: lingkungan kehidupan. Pengrusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif yang sangat parah pada beberapa belahan dunia; termasuk dalam tatanan geografis negara Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan sumber alam yang tidak terencana dengan sistem pengelolaan yang tidak wajar mengakibatkan



terjadinya bencana alam yang tidak terkendalikan. Seperti: banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan kemarau panjang. Pada bagian dunia yang lain, kemajuan yang dicapai oleh negara-negara industri menimbulkan polusi yang menambah kompleksitas permasalahan lingkungan. Tentunya kejadian ini, berdampak secara langsung terhadap sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat, yaitu dengan meningkatnya jumlah pesakitan dan merajalelanya hama tikus di tiap-tiap sudut infrastruktur dan lingkungan tempat tinggal.

Temuan lainnya soal perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat. Perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural (struktur masyarakat), dan dampaknya terhadap kehidupan sosial Hal ini terjadi pada bulan Desember 2016 di Bima khususnya di masyarakat Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima. Lokasi yang terparah banjir bandang tersebut adalah Lingkungan Lewi Loa Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima (Firdaus Firdaus, Kadir Abdul, Nur Muhammad, Yasin Haerun,2020)

Seirama dengan penelitian tersebut, dalam penelitian yang dilakukan Sandra Appleby-Arnold, dkk 2020, tentang perubahan yang terjadi pasca bencana menemukan, ada bukti kesamaan kelompok di luar faktor demografis ini, yang menunjukkan hubungan antara budaya dan persepsi risiko. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan bencana dan diketahui bahwa pengalaman bencana masa lalu memengaruhi persepsi kita tentang risiko bencana. Faktor-faktor ini disiapkan dengan cara yang sangat spesifik, dapat berdampak, tetapi tidak secara langsung mengarah pada peningkatan kesadaran akan resiko di masa depan. Namun, penelitian studi yang sama tidak menemukan korelasi antara kepercayaan warga negara pada entitas tertentu dan bantuan yang diharapkan dari lembaga tersebut. Kepercayaan pada otoritas memiliki beberapa aspek (perilaku kepercayaan, niat untuk mempercayai, kemauan untuk mempercayai) dipahami sebagai faktor budaya yang terkait dengan persepsi kompetensi dan integritas (Sandra Appleby-Arnold, dkk, 2020).

Temuan di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya rawan bencana di lokasi bencana. Pembelajaran di Kecamatan ngancar dan Kepung Kabupaten Kediri BPBD kabupaten Kediri bersama Jangkar Kelud mengadopsi program desa saudara dari BPBD Kabupaten Magelang yang telah berhasil mengembangkan *application* Desa Bersaudara di KRB Gunung Merapi pasca erupsi 2010.

Program desa bersaudara upaya pengurangan resiko bencana dengan menempatkan pengungsi di desa bersaudara yang letaknya di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Kelud, sehingga apabila bencana terjadi, masyarakat di KRB Gunung Kelud tidak panik dan bingung karena suasana.. Program pengembangan Desa bersaudara atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah '*Sister Village*' secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mempertemukan antara desa yang berada dalam kawasan rawan bencana dengan desa yang berada dalam kawasan aman.

Bisa jadi ini akan menjadi solusi penanganan bencana yang lebih baik, karena disiapkan dengan matang terjadinya bencana dengan perencanaan dan pembahasan yang mendalam tentang berbagi peran dalam upaya menyelamatkan warga dari ancaman bencana. Upaya ini dilakukan sebagai solusi sederhana menyikapi masih semerawutnya penanganan pengungsian di beberapa daerah rawan bencana karena masih berdasarkan penanganan kedaruratan tanpa didukung kegiatan pra dan pasca bencana (Windiani, IB Wirawan dan Sutinah, 2014)

## 2. Perubahan perilaku dan budaya.

Perubahan perilaku sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia yaitu

1). Ditandai oleh adanya tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari, dapat dilaksanakan langsung secara praktik dan melalui tahapan proses belajar. Perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perubahan perilaku merupakan suatu paradigma bahwa manusia akan berubah sesuai dengan apa yang mereka pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun belajar dari diri mereka sendiri, proses pembelajaran diri inilah

yang nantinya akan membentuk seseorang tersebut. Hal inilah yang dialami masyarakat Rabadompu Timur Kota Bima ketika terjadi banjir bandang pada bulan Desember 2016.

2). Ditandai oleh adanya pergeseran nilai kepedulian. Masyarakatnya kurang peduli terhadap keadaan sesama, sebab dulu masyarakat Rabadompu ini sangat kuat sistem kekeluargaan dan gotongroyongnya. Pada saat ini masyarakat Rabadompu Timur hanya mengurus diri sendiri seperti memperbaiki rumah sendiri.

3). Ditandai oleh renggangnya rasa kekeluargaan dan kebersamaan pada masyarakat Rabadompu Timur. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya rasa saling membantu antara masyarakat, mereka lebih memilih untuk mengerjakan rumah mereka sendiri ketimbang saling membantu. Dulu masyarakat Bima terkenal dengan budaya "*weha rima*" yaitu saling membantu dengan cara meminjam tenaga dan diganti dengan tenaga lainnya. Misalnya, saling membantu saat memanen jagung, atau memanen produk pertanian lainnya memanen padi.

4). Ditandai dengan mudahnya budaya yang ada di masyarakat Rabadompu Timur kota Bima seperti budaya rumah panggung dengan ukiran-ukirannya, kepercayaan akan *makakamba-makakimbi* dan lagu daerah seperti; haju jati, pasapu monca, rawa kapatu. Karena itu, kita lebih mengoptimalkan pengembangan Masyarakat di kota Bima lebih khusus di Kelurahan Rabadompu Timur kota Bima.

5). Ditandai oleh adanya ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, yang berakar pada persepsi warga bahwa sistem perlindungan sipil masing-masing tidak bekerja secara efektif. Telah dikaitkan dengan sikap fatalistik yang juga menghambat kesiapsiagaan bencana (Sandra Appleby-Arnold dkk, 2018)

6). Ditandai oleh adanya isu budaya dalam layanan kesehatan mental bencana yang efektif telah mendapat perhatian yang terbatas, meskipun bukti menunjukkan pentingnya kompetensi budaya dalam menanggapi kebutuhan korban bencana. Program Bantuan dan Pelatihan Konseling Krisis (PKC) memberikan contoh yang kuat tentang layanan kesehatan mental bencana yang kompeten secara budaya (Kulatunga, Yates, Wedawatta, G, 2014)

7). Ditandai oleh adanya diskriminasi masalah gender. Sejauh ini kita telah melihat bahwa perbedaan biologis dan fisiologis serta norma sosial dan perilaku peran dapat merugikan perempuan jika terjadi bencana alam. Ketika bencana alam melanda, praktik-praktik diskriminatif yang sudah ada sebelumnya ini menjadi lebih buruk dan dampak kesehatannya yang merugikan terhadap perempuan dan anak perempuan semakin intensif. Perempuan terkena dampak buruk dari kerusakan mata pencaharian ekonomi karena strategi bertahan hidup seperti mengamankan air, makanan, dan kayu untuk keperluan pemanas sering kali dibebankan pada perempuan, yang merupakan beban ekstra selain merawat dan mengasuh keluarga (Neumayer Eric, Plumper Thomas, 2007)

### 3. Kondisi perubahan ekonomi.

Perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi dari akibat bencana ditandai oleh adanya: 1).kehilangan mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan, hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat. Sebelum banjir kondisi ekonomi warga masyarakat Negeri Hena Lima dapat dikatakan sangat bagus, namun sekarang mengalami perubahan yang sangat drastis karena sebagian besar warga kehilangan lahan perkebunan tanaman produktif, seperti Cengkeh, Pala dan Kelapa. Sejak tahun 2013 pasca bencana banjir Wae Ela hingga sekarang, banyak perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi di Negeri Hena Lima (Soulisa Syafin, 2019) 2). meningkatnya jumlah masyarakat yang miskin, angka pengangguran mengalami peningkatan berbarengan dengan runtuhnya perekonomian bangsa baik dalam bidang migas ataupun non migas sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan.

Di lain pihak, penambahan jumlah pemuda yang berumur di bawah 14 tahun dan orang dewasa di atas 65 tahun tidak berimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga menambah pincang sistem sosial budaya masyarakat. Sistem asuransi kesehatan serta jaminan sosial yang belum memadai menambah kompleksitas permasalahan di sektor sosial. Belum lagi, kelompok-kelompok imigran dengan berbagai alasan (keamanan dan ekonomi) yang semakin banyak jumlahnya, menimbulkan pergeseran nilai

yang tidak jarang menimbulkan ketegangan, pertentangan dan perselisihan yang berbau SARA. Permasalahan sosial budaya masyarakat pada akhirnya berdampak negatif juga terhadap program sanitasi dan kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga mempermudah terjadinya epidemik, seperti HIV/AIDS atau yang terakhir ini menggemparkan dunia yaitu wabah SARS.

Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang adalah kemiskinan. Krisis multidimensi yang terjadi pada bangsa Indonesia lima tahun terakhir ini berimbas kepada keseluruhan sendi-sendi kehidupan, baik aspek psikologis, sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan pendidikan. Kemiskinan menjadi problem bangsa yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia bukan satu permasalahan yang mampu diselesaikan dengan menggunakan satu analisis linier, akan tetapi memerlukan analisis multidimensi yang bersifat "total" untuk menyelesaikannya. Permasalahan kemiskinan berdampak secara krusial pada aspek-aspek kehidupan lainnya, khususnya pada sistem pendidikan bangsa yang sekarang ini sedang berusaha untuk bangkit dan mampu bersaing dengan negara-negara lain baik secara regional ataupun internasional.

#### 4. Perubahan Infrastruktur.

Perubahan yang terjadi pada bidang pembangunan infrastruktur ditandai oleh adanya, *pertama*, penataan infrastruktur jalan, dimana jalan yang dulunya rusak akibat banjir bandang semuanya sudah diperbaiki. *Kedua*, penataan infrastruktur resapan air/got, ada yang berpendapat bahwa terjadinya banjir di kota Bima diakibatkan karena mampetnya resapan air/got yang ada sehingga setelah banjir bandang semua resapan air/got yang ada di kota Bima semuanya sudah diperbaiki. Perubahan infrastruktur resapan air/got, kita bisa lihat got yang kemarin rusak akibat banjir sudah diperbaiki, got yang kemarin tersumbat sudah dikeruk dan udah lancar, bukan hanya itu got sudah dipercantik dan dicor sehingga terlihat lebih bagus tatanannya. *Ketiga*, perubahan Rumah Warga. Semua rumah yang rusak akibat banjir bandang mendapatkan dana perbaikan dari pemerintah sehingga setelah banjir bandang banyak sekali pembangunan rumah warga khususnya di

kelurahan Rabadompu Timur, namun ada yang berubah dari rumah warga yaitu semua masyarakat mulai membangun rumah dari bata yang tadinya rumah panggung, dan pondasi rumah mereka lebih tinggi karena mereka khawatir terjadi banjir lagi di tahun yang akan datang.

#### Pembahasan

Adanya pemukiman baru dan jauh dari tetangga bagi para korban bencana alam menunjukkan, masyarakat korban bencana membangun sistem sosial yang baru melalui interaksi yang mereka lakukan setiap hari. Di Pemukiman Baru ini mereka membangun sebuah komunitas yang dibangun atas dasar pola pikir yang rasional dan perilaku baru yang didasari sikap yang selalu menjaga budaya yang rasional. Apa yang disampaikan Talcot Parsons bahwa sistem sosial akan terbentuk melalui kemampuan warga dalam melakukan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan terjadi pada komunitas korban bencana alam di Indonesia. Seperti apa hasil adaptasinya, pencapaian tujuannya, integrasi dan perawatannya? Tergantung kepada kemampuan dan pengetahuan warga dalam membangun komunitasnya.

Karena itu, yang menjadi harapannya, warga memiliki orientasi kegiatan adaptasi yang sesuai dengan tujuan kehidupan bersama kepada komunitas baru. Tujuan yang dicapai warga dalam perkampungan baru ini yaitu membangun komunitas yang memiliki kepedulian terhadap sesama karena berangkat dari keprihatinan yang sama-sama mengalami keterasingan di tempat baru sebagai akibat dari bencana alam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, warga perlu memiliki sikap integrasi yang sangat tinggi karena sama-sama memiliki kesadaran dan keyakinan akan sebuah nilai (*vallues*) kebersamaan, nilai solidaritas, nilai kepedulian terhadap sesama, nilai adat yang sama. Bangunan *vallues* ini membuat warga pemukiman baru memiliki kemampuan integrasi yang sangat tinggi.

Tentu tidak cukup sampai pada integrasi tetapi membutuhkan pemeliharaan dan melakukan perawatan dalam membangun komunitas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Kehidupan bersama dalam suatu komunitas yang

baru membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan, kekompakan sebagai pilar kehidupan demokrasi.

Dalam dunia yang semakin mengglobal, ketergantungan antar sistem sosial merupakan suatu keniscayaan yang akan selalu saling mempengaruhi dan mendorong terjadinya pertumbuhan, pergeseran, dan perubahan nilai dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan mewarnai cara berpikir dan berperilaku manusia. Percepatan perubahan ini berdampak kepada hal-hal berikut: 1) ketergantungan antar kawasan semakin tinggi; 2) perkembangan IPTEK yang makin pesat; 3) perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat, dan 4) tuntutan terhadap peningkatan layanan profesional dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi ditandai pula dengan munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat, baik yang bertendensi religi, politik, ekonomi, sosial bahkan kelompok-kelompok kriminal.

Adanya temuan perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan ekonomi, perubahan infrastruktur menunjukkan ada dinamika sosial pascabencana. Perubahan yang terjadi menunjukkan ada progresif atau kemajuan dalam membangun masyarakat baru pasca bencana. Sikap progresif ini menunjukkan adanya semangat warga untuk tetap eksis memperbaiki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Sikap progresif warga ini didukung oleh adanya tindakan pencegahan dan mitigasi akan mendapat perhatian lebih di daerah bencana. Jika bencana merupakan manifestasi dari kerentanan suatu sistem sosial, maka yang harus mendapat prioritas perhatian, adalah sistem sosial. Dengan menempatkan bencana sebagai fenomena sosial, dapat dilakukan tindakan preventif, membuat kita memperhatikan diri kita sendiri (manusia) daripada di luar (alam). Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa bencana bukanlah kekuatan eksternal yang menyerang komunitas, tetapi lebih merupakan manifestasi dari kurangnya persiapan dan kewaspadaan komunitas terhadap kekuatan eksternal yang merusak seperti bencana. Perspektif ini masuk akal untuk membantu kita lebih siap menghadapi bencana, karena kita melihatnya sebagai fenomena sosial.

Ketika warga korban bencana berinisiatif mencari tempat pemukiman yang baru dan terbukti mereka berhasil membangun kembali rumah tangga di lokasi yang baru sejalan dengan pandangan Parsons tentang stabilitas sistem sosial yang tidak hanya dipertahankan oleh aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat kepada anggotanya tetapi anggotanya, warganya, yang lebih dilestarikan, melalui internalisasi, dari nilai-nilai yang disepakati. Sebab di lokasi yang baru ini mereka harus membangun relasi dengan warga lain berdasarkan suasana keprihatinan terutama karena mengalami nasib yang sama yaitu sama-sama menderita dari korban bencana. Kemudahan berkomunikasi dengan sesama karena ada kesamaan nilai sehingga mudah melakukan adaptasi terhadap sesama. Demikianpun dalam hal menginternalisasi nilai-nilai kebaikan terhadap lingkungan keluarga maupun dengan tetangga menjadi satu kesatuan. Realita tersebut sejalan dengan teori yang dikembangkan Talcott Parsons. Menurut Parsons, jika semua individu dalam masyarakat memiliki budaya yang sama, mereka membentuk suatu sistem sosial. Selain kesamaan budaya, diperlukan suatu sistem sosial bahwa tindakan sosial dari berbagai anggota masyarakat harus terkoordinasi dengan baik dan tidak boleh bertentangan sehingga merusak harmoni sosial. Dalam masyarakat maju, lembaga-lembaga tertentu melakukan pekerjaan sistematisasi tindakan sosial ini.

Dalam sistem sosial menurut Parson dihadapkan kepada 4 fungsi yaitu 1). fungsi adaptasi; 2), fungsi pencapaian tujuan; 3). fungsi integrasi; 4). fungsi mempertahankan dan memelihara sistem yang ada dalam kehidupan bermasyarakat (Mohinuddin, 2022)

Adanya ketidakpercayaan warga korban terhadap pihak berwenang (pejabat public) karena tidak dapat bekerja secara efektif menunjukkan birokrasi kita belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga korban. Padahal warga korban bencana ini sungguh-sungguh membutuhkan perhatian dari pejabat public karena tergolong warga masyarakat yang lagi tidak berdaya. Dengan demikian, situasi ini memberikan gambaran birokrasi perlu ditingkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Adanya ketidakpercayaan warga korban terhadap pihak

berwenang (pejabat public) karena tidak dapat bekerja secara efektif menunjukkan birokrasi kita belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga korban.

Dalam teori *The New Public Administration Theory* menekankan bahwa suatu pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada warganya dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen bisnis ke manajemen public. Teori ini di Amerika sudah bisa diterima melalui proyek Tinjauan Kinerja Nasional selama pemerintahan Clinton, dan meletakkan dasar bagi reformasi FEMA. Kecewa dengan respon FEMA yang tidak efektif terhadap bencana alam besar-besaran ini, kelompok politik dan warga di AS meningkatkan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja FEMA, yang didukung oleh Pemerintahan Clinton pada tahun 1993. James Lee Witt, ditunjuk sebagai direktur FEMA oleh Presiden Clinton, menekankan mitigasi bencana dan bergeser dari kebijakan berorientasi pemulihan ke kebijakan berorientasi pencegahan.

Dalam teori tata kelola publik, aturan mengatur perilaku aktor menurut proses konsensus antara peserta berdasarkan jaringan dan kerjasama, bukan sebagai hasil dari otoritas formal atau keseimbangan pasar. Kolaborasi yang efektif dalam lingkungan ini membutuhkan kepekaan budaya dan saling pengertian dari semua pihak yang terlibat. Jaringan kolaborasi juga menjadi penting dalam masyarakat saat ini dengan risiko baru dan kompleks. Keuntungan dari teori tata kelola publik adalah bahwa kelompok sosial yang berbeda dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menggunakan kecerdasan sosial untuk menghadapi ketidakpastian, dan membuat keputusan kebijakan berdasarkan konsensus sosial, yaitu tentang memperkuat tanggung jawab bersama. Tujuannya adalah untuk membangun sistem tata kelola risiko kolaboratif yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Moynihan mengatakan membangun tata kelola jaringan adalah faktor kunci dalam mencapai dua tujuan "kerja sama antar kementerian" dan "tanggapan yang konsisten" dalam situasi krisis untuk tanggap bencana yang efektif. Teori tata kelola publik juga penting untuk pengembangan sistem pengurangan risiko bencana Korea Selatan. Bencana Korea Selatan baru-baru

ini seperti runtuhnya Mauna Ocean Resort Gymnasium yang tidak disengaja, tenggelamnya Feri Sewol yang tidak disengaja, dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah telah memberi Korea Selatan pelajaran penting tentang kerja sama antara semua organisasi terkait seperti situs tersebut.

Adanya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat korban bencana membutuhkan penanganan yang serius dari birokrasi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh warga korban bencana. Di Indonesia kasus korban bencana tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Dengan perkembangan perdagangan dan penetapan standar hidup tertentu sebagai praktik sosial, kemiskinan kemudian muncul sebagai masalah sosial. Dalam masyarakat sederhana dengan struktur dan organisasi, kemiskinan dianggap sudah ditentukan sebelumnya, sehingga mungkin bukan masalah sosial dan tidak ada upaya untuk mengatasinya. Dalam masyarakat modern yang kompleks, kemiskinan menjadi masalah sosial dengan sikap membenci kemiskinan. Namun kekayaannya dianggap tidak cukup untuk menutupi standar hidup yang ada. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, objek sekunder ini menjadi ukuran status sosial ekonomi seseorang, miskin atau kaya. Secara sosial, kemiskinan disebabkan oleh salah satu pranata sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Namun, dalam masyarakat tertentu, ada budaya di mana berkah kehidupan datang ketika seseorang bepergian ke tempat lain. Sepintas, dalam masyarakat pertama, tampaknya penting bagi orang untuk dapat makan dan minum, dan tidak terlalu penting untuk memiliki arti hidup yang berlebihan atau berkecukupan. Penting untuk hidup dengan baik di masyarakat ini.

Adanya penanataan struktur jalan raya ke pemukiman warga korban bencana, menunjukkan pemerintah perlu melakukan antisipasi sejak dini di berbagai daerah rawan bencana. Antisipasi terhadap bencana alam yang akan terjadi sangatlah dibutuhkan. Dan organisasi yang harus menjadi pelopor adalah birokrasi. Kepeloporan ini dilakukan melalui langkah-langkah: pada wilayah-wilayah yang rawan banjir maka harus melakukan normalisasi sungai-sungai yang dianggap menjadi penyebab banjir agar sungai tersebut bisa menampung limpahan air hujan. Selain itu, juga melakukan kepeloporan di dalam konservasi lahan

kritis dengan penanaman sejuta pohon, misalnya, fungsi birokrasi yang bisa memengaruhi dana alokasi APBN/D, bisa diwujudkan dalam karya ini. Melakukan upaya hukum dengan tidak tebang pilih adalah salah satu jalan yang harus segera diwujudkan. Fungsi birokrasi dalam legislatif, bisa diwujudkan dalam penegakan hukum ini. Karena banjir dan tanah longsor bisa terjadi jelas karena ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam (Rina Martini, 2007).

Pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat korban bencana pada pascabencana tidak berarti tugasnya sudah selesai. Masyarakat masih membutuhkan pendampingan, komunikasi yang terfokus dan konsisten terhadap kehidupan mereka setiap hari. Sebab tragedi bencana tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu, pemerintah dalam hal ini BNPB tetap siaga untuk melakukan tindakan yang konkrit dalam menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan maupun pelatihan tenaga SDM yang terampil dalam mengatasi persoalan bencana jika sesewaktu datang secara tiba-tiba (Putra Edwin Pramana, Tukiman, 2019)..

## KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan fenomena bencana alam di Indonesia membawa perubahan sosial, perilaku budaya, ekonomi, infrastruktur bagi masyarakat korban bencana.

Konsep perubahan sistem sosial yang dikembangkan Talcot Parsons masih relevan untuk dikembangkan di Indonesia karena korban bencana dapat melakukan perubahan sosial melalui mekanisme adaptasi, pencapaian tujuan, dapat melakukan integrasi, dapat memelihara unsur kebersamaan dalam membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan memiliki peradaban yang tinggi.

### 2. Saran

Dalam mengelola warga masyarakat korban bencana, pemerintah ikut bertanggung jawab dalam membangun komunitas baru melalui pembangunan rumah baru bagi warga korban bencana maupun melalui perbaikan rumah warga yang rusak serta membangun infrastruktur untuk melancarkan roda perekonomian warga korban.

Pemerintah juga selalu meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada warga korban bencana melalui peningkatan pelatihan antisipasi bencana dan studi banding kepada warga korban bencana yang sudah sukses membangun perkampungan baru bagi korban bencana. Studi banding ini dilakukan dalam rangka membangun nilai persaudaraan sesama warga korban bencana tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Lukman (2020). Mitigasi Bencana Gempa di Kota Surabaya (Kajian tentang Upaya Antisipatif Pemerintah Kota Surabaya dalam Mengurangi Resiko Bencana), *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10 (1), April 2020
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020. Rencana Nasional Penanggulan Bencana (Renas PB) 2020-2024. Diakses 15 Juli 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020. Potensi Bencana. Diakses 15 Juli 2022. <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>
- Calhoun Creig, et al 2007. Classical sociological theory (second edition), blackwel publishing <https://sociologicalfragments.files.wordpress.com/2019/10/calhoun-et-al-2002-contemporary-sociological-theory.pdf>
- Firdaus Firdaus, Kadir Abdul, Nur Muhammad, Yasin Haerun, 2020. Perubahan Sosial Pasca Banjir Bandang pada Masyarakat Rabadompu Timur Kota Bima, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)*, Bima
- Form William, social change sociology, *Britannica*, diakses 27 Feb 2022) <https://www.britannica.com/topic/social-change>
- Ita Rustiati Ridwan, 2010. Menyikapi Bencana menjadi Fenomna Sosial Terintegrasi, *Jurnal Geografi GEA*, Vol 10 No 1 (2010)
- Kulatunga, U, Yates, G.P, Wedawatta, G, Culture and the psychological impacts of natural disasters: Implications for disaster management and disaster mental health *Jogia, J, The Built & Human Environment Review*, Volume 7, 2014)

- Lori Peek<sup>1</sup>, Heather Champeau<sup>1</sup>, Jessica Austin<sup>1</sup>, Mason Mathews<sup>2</sup>, dan Haorui Wu<sup>3</sup>, (2020) What Methods Do Social Scientists Use to Study Disasters? An Analysis of the Social Science Extreme Events Research Network, *American Behavioral Scientist* 2020, Vol. 64(8) 1066–1094 © 2020 SAGE Publications Article reuse guidelines: [sagepub.com/journals-permissions](https://sagepub.com/journals-permissions) DOI: 10.1177/0002764220938105 [journals.sagepub.com/home/absSage](https://journals.sagepub.com/home/absSage))
- Mohinuddin, Talcott Parsons Social System Theory On April 25, 2022 <https://www.sweducarebd.com/2022/04/talcott-parsons-social-system-theory.html>)
- Neumayer Eric, Plumper Thomas, 2007. The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002 *All Journal Association of American Geographers*, Volume 97, Issue 3 2007 <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x>
- Putra Edwin Pramana, Tukiman, 2019. Implementasi Kebijakan Layanan Tanggap Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Surabaya, *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim* Volume 9 Nomor 1 April tahun 2019 22
- Pablo Aznar-Crespo, Antonio Aledo, Joaquesyan Melgarejo-Moreno, dan Arturo Vallejos-Romero, Adapting Social Impact Assessment to Flood Risk Management, *Publisher’s Note: MDPI, Sustainability* 2021, 13, 3410. <https://doi.org/10.3390/su13063410>)
- Rina Martini, (2007), Pemanfaatan Birokrasi dalam Penanggulangan Bencana, *Majalah Pengembangan Sosial FORUM*, Fisip Undip Semarang).
- Sandra Appleby-Arnold, Noellie Brockdorff, Ivana Jakovljević, Cica Zdravković, Applying cultural values to encourage disaster preparedness: Lessons from a low-hazard country, *Elsevier, International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2018, 37-44, [journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijdr](http://www.elsevier.com/locate/ijdr))
- Soulisa Syafin, 2019. Perubahan Sosial Masyarakat Negeri Hena Lima Pasca Bencana Banjir Wae Ela di Kecamatan Leihtu Kabupaten Maluku Tengah, *Dialektika : Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* Vol. 12, No. 01 | 2019
- Wanda Fitri, , Nilai Budaya Lokal, Resiliensi, dan Kesiapan Menghadapi Bencana Alam Personafikasi, Vol. 5, No. 2 November 2014, 124-136)
- Windiani, IB Wirawan dan Sutinah, 2014. Pengelolaan Bencana Berbasis Kapasitas Lokal di Kawasan Gunung Kelud Pasca Erupsi Tahun 2014 (Studi Rawan Bencana Gunung Kelud Kabupaten Kediri).

